

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2016**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam Program Legislasi Daerah;
- b. bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menyusun Program Legislasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2016.
- KEDUA** : Daftar Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Nopember 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,**

SUJANARKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 24 Nopember 2015

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2016**

| NO | JUDUL RAPERDA | POKOK-POKOK MATERI | KET. |
|-----------|--|--|--------------------|
| 1. | Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. | Tindaklanjut Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman dan Permenpera nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman bantuan stimulan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. | Inisiatif Walikota |
| 2. | Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2007 | Mengubah Perda 4 Thn 2007 ttg Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. | Inisiatif Walikota |
| 3. | Pondokan. | Pengganti Perda 4 Tahun 2003 ttg Penyelenggaraan Pondokan dan menyesuaikan kondisi saat ini. | Inisiatif Walikota |
| 4. | Penyertaan modal kepada PDAM | Tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan Kinerja dari Auditoriat Utama Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY`. | Inisiatif Walikota |
| 5. | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | Pengganti Perda 4 tahun 2001 yang mengatur tentang perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Yogyakarta. | Inisiatif Walikota |
| 6. | Penyelenggaraan Kearsipan | Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah. | Inisiatif Walikota |
| 7. | Retribusi Pelayanan Pasar | Mengubah Perda 5 Thn 2012 ttg Retribusi Jasa Umum menjadi Retribusi Pelayanan Pasar. | Inisiatif Walikota |
| 8. | Penanggulangan Kebakaran | Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Bencana Kebakaran. | Inisiatif Walikota |
| 9. | Penataan Pedagang Kaki Lima | Pengganti Perda Nomor 26 tahun 2002 ttg Penataan Pedagang Kaki Lima. | Inisiatif Walikota |
| 10. | Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok RSUD. Pratama Kelas D. | Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Rumah Sakit Pratama. | Inisiatif Walikota |
| 11. | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | Mengubah Perda Nomor 13 tahun 2009 ttg Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | Inisiatif Walikota |
| 12. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. | Mengubah Perda 4 Thn 2012 ttg Retribusi Jasa usaha menjadi pengaturan perjenis retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. | Inisiatif Walikota |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------|
| 13. | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | Mengubah Perda 5 Thn 2012 ttg Retribusi Jasa Umum menjadi Retribusi Pengolahan Limbah Cair. | Inisiatif Walikota |
| 14. | Perizinan dan Sertifikasi bidang Kesehatan. | Pengganti Perda 2 tahun 2008 karena saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan kondisi saat ini. | Inisiatif Walikota |
| 15. | Kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. | Penyesuaian SOTK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | Inisiatif Walikota |
| 16. | Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah | Penyesuaian SOTK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | Inisiatif Walikota |
| 17. | Kelembagaan Dinas Daerah | Penyesuaian SOTK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | Inisiatif Walikota |
| 18. | Ketertiban Umum | | Inisiatif DPRD |
| 19. | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Edukasi | | Inisiatif DPRD |
| 20. | Penataan Transportasi Lokal Kota Yogyakarta | | Inisiatif DPRD |
| 21. | Sistem Olahraga Daerah | | Inisiatif DPRD |
| 22. | Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas | | Inisiatif DPRD |
| 23. | Tanggungjawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) | | Inisiatif DPRD |
| 24. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 | | Inisiatif Walikota |
| 25. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 | | Inisiatif Walikota |
| 26. | APBD Tahun Anggaran 2017 | | Inisiatif Walikota |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,**

TTD

SUJANARKO

